

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendewasaan yang terjadi pada sistem ketatanegaraan kita telah terjadi sejak runtuhnya rezim Orde Baru dan dimulainya proses Amendemen UUD 1945, terhitung sejak tahun 1999 hingga tahun 2002. Proses pendewasaan berbangsa dan bernegara kerap kali menimbulkan dinamika dan konflik dalam sebuah lembaga negara. Namun formulasi tepat dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah sebuah sistem yang disebut sebagai sistem presidensil. Sistem presidensil merupakan sebuah sistem yang membedakan dengan jelas antara dua kelembagaan yang eksekutif dan legislatif.¹

Dalam sistem presidensil, tanggung jawab tertinggi seorang Presiden adalah bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya dan bukan kepada parlemen, karena dalam sistem ini parlemen yang merupakan lembaga legislatif berfungsi sebagai pengawas dari kinerja yang dilakukan oleh eksekutif dalam hal ini Presiden-Wakil Presiden dan para Menteri. Sistem presidensil ini juga merupakan sistem yang relevan pada demokrasi kita hari ini karena pemimpin yang dalam hal ini Presiden dapat langsung dipilih oleh rakyat dengan menerapkan asas-asas demokrasi yang telah tercipta sejak bangsa ini diproklamirkan.

Demokrasi di Indonesia adalah sebuah diskursus yang menarik dalam setiap pembahasan dan selalu menjadi topik hangat untuk diperbincangkan, hal tersebut

¹ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 23-24.

selalu berkaitan dengan bagaimana implementasi atau proses demokrasi di Indonesia apakah sudah berjalan cukup baik atau masih banyak pekerjaan rumah bagi bangsa dan negara ini. Demokrasi sendiri tidaklah memiliki artian yang sempit, dan masyarakat Indonesia juga tidak asing dengan apa itu Demokrasi, karena Demokrasi merupakan sebuah konsep terbaik yang pernah tercetuskan dan sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Indonesia dalam perjalanan panjangnya sebagai bangsa yang merdeka juga kerap kali menggunakan banyak istilah dan corak dalam sistem民主nya. Seperti halnya ketika menggunakan corak demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin ala Presiden Soekarno. Dalam setiap negara, memang memiliki corak tersendiri dalam menentukan bagaimana sistem demokrasi dijalankan, ada beberapa jenis dan corak dalam demokrasi, seperti demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi parlementer, demokrasi konstitusional, hingga demokrasi rakyat dan lain sebagainya.²

Demokrasi sebagai sebuah sistem dan konsep yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat juga kerap kali bisa menjadi bencana dalam sebuah negara. Negara yang dalam hal ini memiliki otoritas tertinggi juga harus menjaga tren baik dalam kancah politik nasional, namun seharusnya demokrasi yang dianggap telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia harus tetap menjadi penenang dan pengingat secara baik bagi proses kemajuan sebuah bangsa dan negara seperti Indonesia ini. Demokrasi sendiri pada hakikatnya terbagi dua antara elektoral dan non elektoral,

² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 105.

dalam hal ini penulis akan membahas terkait dengan demokrasi non elektoral yang memang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat.

Namun, acapkali keadaan demokrasi di Indonesia jauh dari apa yang diharapkan dan sesuai dengan asas-asas demokrasi. Demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini perlu mendapat sorotan setelah mengalami degradasi demokrasi bahkan dapat dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia masih jauh dari apa yang selama ini diharapkan oleh Masyarakat karena pandangan masyarakat terkait dengan demokrasi Indonesia hari ini, yaitu demokrasi yang bersifat bias dan kerap kali menjadi sebuah pisau bermata dua bagi masyarakat. Dalam praktiknya, demokrasi yang kerap kali diagungkan dan dianggap sebagai prinsip dan konsep yang populis ternyata dalam proses implementasinya cenderung amat elitis dan berpihak kepada para penguasa (oligarki).³

Selanjutnya, menarik ketika bagaimana implemenasi demokrasi di Indonesia berjalan, menurut *The Economist Intelligence Unit* (EIU) indeks demokrasi Indonesia selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengalami sebuah kemerosotan yang drastis seperti halnya pada tahun 2020 yang memiliki indeks sebesar 6,30% dimana hal tersebut jauh lebih buruk dari negara-negara tetangga di ASEAN.⁴ Ini merupakan catatan yang harus segera diperbaiki. Namun, menarik melihat bagaimana pemerintahan Presiden Joko Widodo selama kurun waktu 2014-2019 bahkan hingga saat ini. Menariknya adalah ketika indeks

³ I Nyoman Wiratmaja, *Dilema Demokrasi Elektoral*, Volume 1 No.2, Jurnal Bappeda Litbang, (Agustus, 2018)

⁴ Kurnia Yunita Rahayu, Iqbal Basyari, Nina Susilo, *Skor Indeks Demokrasi Indonesia Membaik, tetapi Tantangan Masih Besar*, www.kompas.id diakses pada tanggal 1 Agustus 2022.

demokrasi mengalami penurunan artinya masyarakat memiliki penilaian dan persepsi yang buruk terhadap pemerintahan yang telah dua periode berlangsung ini.

Hal ini tidak terlepas dari bagaimana dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan manuver-manuver politik selama masa pemerintahannya dan didukung pula oleh koalisi partai politik pendukung yang membuat Pemerintahan Joko Widodo terkesan hanya milik segelintir orang dan juga hanya menguntungkan segelintir orang saja, dalam perkembangannya sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 bahkan hingga kini. Status partai koalisi yang bengkak pada masa pemerintahan Jokowi mulai dari periode pertama hingga periode kedua memberikan kenyamanan kekuasaan yang membuat tidak terciptanya iklim demokrasi yang baik karena Pemerintah yang dalam hal ini didukung oleh partai Koalisi dengan cepat membungkam siapapun yang tidak sejalan dengan pemerintahan yang ada.

Kepemimpinan di era Joko Widodo dan Maruf Amin juga menjadikan sebuah catatan kelam demokrasi di Indonesia ini. Pelbagai macam kejadian yang seharusnya menjadi ruang berekspresi masyarakat justru dengan mudahnya dibredel oleh aparat, kasus HAM di Papua yang tak kunjung usai dan menggunakan pendekatan militeristik dan pembungkaman terhadap kritik-kritik yang ada menjadi sebuah catatan yang serius dalam pemerintah periode kedua Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tidak hanya itu, apa yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini juga kerap kali hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat yang dalam hal ini selalu berpihak kepada para pengusaha dibandingkan rakyat. Kasus terkait dengan perampasan tanah adat, pembangunan tanpa AMDAL merupakan sebuah hal yang lazim dalam pemerintahan era Joko

Widodo dan Ma'ruf Amin, hal tersebut berjalan dengan menepis segala kritik dan meminggirkan keluhan rakyat yang ada.

Pemerintahan hari ini, sangat lah berfokus pada bagaimana proses konsolidasi partai politik yang matang dan diperhitungkan, sehingga hal ini menimbulkan terciptanya sebuah koalisi partai politik yang solid. Koalisi partai politik yang terlalu besar juga akan menciptakan sebuah efek domino dalam proses berbangsa dan bernegara. Dalam penerpannya, tidak adanya *check and balances* menyebabkan apapun yang diagendakan pemerintah bersama dengan koalisi akan lebih mudah terlaksana dibandingkan dengan apa yang diusulkan oleh partai yang bersebrangan dengan pemerintah (oposisi).

Konsolidasi partai politik yang kuat pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tidaklah hanya pada saat persiapan menuju Pemilu 2019, melainkan jauh sebelum itu dan bahkan koalisi ini sudah terbentuk dari bagaimana periode pertama Jokowi bersama Jusuf Kalla menjadi pemenang pada tahun 2014 silam. Hal ini terlihat dari bagaimana komposisi yang tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya dimana partai-partai seperti PDI-P, PKB, GOLKAR, NASDEM, PPP, HANURA dan PSI. Sementara itu partai yang bergabung pada medio 2019-2022, seperti GERINDRA, dan PAN yang baru saja bergabung.

Koalisi yang gemuk pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Semakin memperbesar gap di parlemen antara partai oposisi yang hanya diisi oleh Partai Demokrat dan PKS. Selain itu kancangnya lobi-lobi politik membuat periode kedua pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo membuat partai koalisi menguasai segala lini dalam sistem pemerintahan di

Indonesia. Masuknya PAN kedalam istana juga sangat memperkuat koalisi di dalam parlemen, menurut data sekitar 471 kursi parlemen atau jika dihitung dalam persentasi sekitar 81,9%.⁵ Yang menjadikan lembaga tersebut menjadi cukup subjektif akan keadaan dan realitas sebenarnya sebuah bangsa karena merupakan bagian dari lingkaran pemerintah. Konsolidasi dan pengkondisian politik semacam ini menjadikan suasana dan iklim politik nasional menjadi lebih monoton karena cenderung aman-aman saja tanpa adanya perlawanan yang berarti dari partai oposisi di dalam parlemen. Masuk nya sejumlah partai kedalam koalisi pemerintah juga tidak terlepas dari bagaimana pembagian kursi pada tingkatan Eksekutif .

Dengan banyaknya kursi dalam parlemen yang secara tidak langsung menghegemoni parlemen, membuat pemerintah dan koalisinya nyaman bermain peran dan bisa saja meraup keuntungan dari pelbagai macam kebijakan yang ditetapkan yang tidak sesuai dengan keinginan namun menguntungkan bagi selentingan orang. Gemuk nya koalisi pada periode kedua Joko Widodo dan Ma'ruf Amin membuat pengkondisian dan konsolidasi tidak hanya berjalan dalam lingkup legislatif melainkan segala sektor lembaga negara yang ada di Indonesia. Adanya dominasi dalam parlemen yang cenderung menghegemonik akhirnya menciptakan kualitas kebijakan yang menurun, output yang penuh problematika bagi masyarakat ini dapat dikatakan sebagai implikasi dari gemuknya koalisi pemerintahan di dalam parlemen, terlebih dalam perumusan hingga penetapan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

⁵ Reza Pahlevi, *Koalisi Pemerintahan Jokowi Saat Ini Lebih Besar dari Era SBY* databoks.katadata.co.id diakses pada tanggal 1 Agustus 2022

Dalam proses pembahasan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja hingga penetapannya, hegemoni dan dominasi yang tercipta dalam parlemen berupa intimidasi dan adanya persamaan tujuan dari beberapa partai politik koalisi pemerintahan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam parlemen, ini lah yang nantinya berdampak pada kebijakan yang justru menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dibandingkan dengan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Dengan demikian, dari mulai Legislatif, Eksekutif, hingga Yudikatif yang semuanya secara tidak langsung sudah diamankan sebagai sebuah kekuatan politik yang besar dan tidak tertandingi. Hal ini berkaca dari berapa jumlah koalisi dalam kabinet dan jaksa agung yang ternyata adik dari seorang politisi partai penguasa. Ini merupakan gambaran dari serangkaian panjangnya diskursus, pembahasan dan analisis yang dilakukan untuk membahas dan mengungkap persoalan baru dalam penelitian ini, yaitu tentang **KEKUATAN POLITIK PARTAI KOALISI DAN HEGEMONI KEKUASAAN DI ERA KEPEMIMPINAN JOKO WIDODO-K.H MAARUF AMIN TERHADAP PARLEMEN DI INDONESIA (Periode 2019-2024)**.

1.2.Rumusan Masalah

Berkaca dari latar belakang yang dituliskan dalam prolog di atas, penulis akan mencoba menganalisis dan mengarahkan pembahasan kepada hubungan dan kekuatan partai politik koalisi dalam pemerintahan Joko Widodo – KH. Ma'ruf Amin dan konsolidasi yang dilakukan sehingga tercipta sebuah konsolidasi yang solid. Karena apa yang hari terjadi dalam sistem pemerintahan di Indonesia menurut

penulis merupakan sebuah catatan kemunduran demokrasi di tingkatan parlemen itu sendiri, terutama dalam hal perumusan kebijakan yang nantinya akan menjadi output bagi masyarakat. Dalam hal ini, penulis mencoba menganalisis dan menjabarkan fakta yang berkaitan dengan perumusan undang-undang cipta kerja atau yang dikenal dengan omnibus law.

Dalam proses pembuatan kebijakan tersebut penulis menemukan berbagai macam kejanggalan seperti proses pembuatan yang begitu cepat dan ngebut, naskah akademis yang masih jauh dari kata sempurna, serta terbungkamnya partai oposisi dalam setiap interupsi-interupsi yang ada dalam sidang paripurna pembahasan Undang-undang Cipta Kerja tersebut. Ini merupakan sebuah hal yang perlu untuk di teliti dan di analisis lebih mendalam berdasarkan teori dan wawancara yang akan penulis gunakan dalam menunjang penelitian kali ini.

1.3.Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan dalam penelitian kali ini, yaitu:

1. Bagaimana Proses Perumusan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) oleh Partai Politik Pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam parlemen?
2. Bagaimana Kekuatan Politik Partai Koalisi dalam menciptakan Hegemoni kekuasaan di Parlemen pada Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, tujuan yang akan dituju dan diinginkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses konsolidasi partai politik dalam perumusan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dalam parlemen sehingga membentuk sebuah koalisi pemerintahan yang solid.
2. Untuk mengetahui kekuatan politik koalisi dan penyebab adanya hegemoni kekuasaan yang dilakukan oleh partai politik koalisi pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin

1.4.2. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, diharapkan memiliki suatu manfaat yang mengarah pada signifikansi, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran ilmiah dan pemahaman yang baru terkait dengan kekuatan politik Indonesia dan hegemoni kekuasaan pada pemerintah, sehingga penelitian sejenis lanjutan dapat menggunakannya sebagai kerangka acuan teoritis kedepannya.
2. Secara akademis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memiliki manfaat guna mengembangkan ilmu politik dalam mata kuliah, khususnya terkait Kekuatan Politik, Partai Politik dan Sistem Politik Indonesia

3. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dengan mampu menjadi sumber acuan bagi para pihak yang terkait dan dapat menjadi salah satu pedoman dalam mengantisipasi sebuah kekuatan politik yang baru di masa yang akan datang
4. Secara sosial, peneliti berharap penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat secara luas dengan menjadikan penelitian ini sebagai model acuan.
5. Secara metodologis, diharapkan kedepannya penelitian lanjutan mampu mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan, teknik, dan metode-metode lainnya.

1.5.Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami terkait dengan pembahasan yang penulis coba bahas dalam penulisan penelitian ini secara keseluruhan, maka perlu dijelaskan sistematika penulisan sebagai kerangka dan acuan penulisan skripsi yang menjelaskan mengenai setiap bab pada penelitian skripsi. Adapun sistematika penulisan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal penelitian ini, berisi tentang halaman judul, lembar persetujuan dosen pembimbing, lembar pengesahan, abstraksi, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel dan daftar lampiran.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian inti atau utama terdiri atas beberapa bab dan sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti menjelaskan uraian permasalahan terkait latar belakang fenomena yang akan dibahas mengenai kekuatan politik partai koalisi pada masa periode kedua Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta hegemoni kekuasaan yang dilakukan. Selain itu, juga bab ini memuat perumusan masalah yang akan ditelaah, tujuan yang diinginkan dari penelitian, sejumlah manfaat yang diperoleh dalam penelitian, dan sistematika penulisan sebagai pedoman penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat studi penelitian terdahulu dengan kajian dan tema yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Setelah itu, bab ini menyajikan landasan teori dan konsep yang akan digunakan dalam memahami dan mengkaji permasalahan yang dibahas. Kemudian, terdapat kerangka berpikir yang menjelaskan garis besar alur pemikiran berjalannya penelitian melalui penegasan teori dengan fakta dan kajian kepustakaan yang dijadikan dasar kegiatan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga ini, peneliti memaparkan mengenai metode ilmiah penelitian yang memuat pendekatan penelitian, serta prosedur dalam menyusun dan melaksanakan penelitian,

seperti teknik pengumpulan data, lokasi dan jadwal penelitian, sumber data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS

Dalam bab ini, peneliti akan memberikan gambaran secara umum tentang profiling Kabinet kedua Pemerintahan Joko Widodo- KH. Ma'ruf Amin, lalu membahas secara singkat Hasil Pemilu 2019 beserta efeknya terhadap parlemen, dan menjabarkan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Serta dalam bab ini penulis juga akan menjawab beberapa pertanyaan penelitian penulis terkait dengan penelitian skripsi penulis

BAB V : PENUTUP

Penutup selanjutnya menjadi bagian terakhir yang terdiri atas kesimpulan dan saran dari apa yang penulis teliti terkait dengan hegemoni di dalam parlemen periode 2019-2024.